



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

LKJIP DPMPTSP 2024

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi
Kabupaten Pangandaran



dpmptsp.kabpangand
aran@gmail.com



[https://dpmptsp.pangandara
nkab.go.id/](https://dpmptsp.pangandara
nkab.go.id/)



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts.71/DPMPTSP/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70)



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 84);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah laporan data Laporan Kinerja dari setiap bidang;
2. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada bidang dimaksud;
4. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap bidang;
5. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja kepada Bupati.

KETIGA

Rincian Tugas Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala Dinas ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



JAJA NURULHUDA, ST. M.Dev.Plq

NIP 19720106 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts.71/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN

-
- | | |
|----------------------|--|
| I. PENGARAH | : KEPALA DINAS |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DINAS |
| III. KOORDINATOR | : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| IV. KETUA | : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| V. SEKRETARIS | : PERENCANA AHLI MUDA |
| VI. ANGGOTA | : |
1. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA KOORDINATOR PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI, PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI;
 2. PENATA PERIZINAN AHLI MADYA KOORDINATOR PROGRAM PELAYANAN;
 3. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA KOORDINATOR PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI, PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI;
 4. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA KOORDINATOR PROGRAM PELAYANAN;
 5. PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 000.7/Kpts. /DPMPTSP/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025**

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN**

- I. PENGARAH :
1. Memberikan arahan kepada Tim tentang materi Laporan Kinerja;
 2. Memberikan arahan kepada Tim tentang teknis Penyampaian Materi Laporan Kinerja.
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja.
- III. KOORDINATOR :
- Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
- IV. KETUA :
- Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan penyusunan laporan kinerja.
- V. SEKRETARIS :
1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja.
- VI. ANGGOTA :
1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan bidang;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dengan mengelompokkan dari sasaran tiap bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan realisasi yang dicapai tiap bidang (sasaran dan program).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran atas penyelenggaraan selama satu tahun terakhir. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran.

LKJIP dari Dinas Penanaman DPMPTSP Kabupaten Pangandaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban DPMPTSP Kabupaten Pangandaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Parigi, 13 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



JAJA NURULHUDA, ST. M.Dev.Plg
NIP 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan. LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban kepada Bupati Pangandaran dan kepada publik baik berupa keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan persentase realisasi nilai investasi Kabupaten Pangandaran. Penyusunan LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Renja sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja instansi pemerintah.

Diharapkan LKJIP ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh Pegawai/staff DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dan *Stake Holder* terkait dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing OPD bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Selanjutnya penyusun sadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang sangatlah diharapkan.

Demikian Penyusun sampaikan sebagai pengantar, atas penyajian LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Semoga DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Parigi, 13 Januari 2025
Salam hormat,

Penyusun

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif..... i

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 1

 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

 1.4 Potensi 9

 1.5 Kinerja Pelayanan..... 10

 1.6 Sistematika Penulisan 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

 2.1 Visi dan Misi Daerah/Kabupaten/Kota 15

 2.2 Tujuan 16

 2.3 Sasaran 16

 2.4 Rencana Strategis 17

 2.5 Arah Kebijakan 17

 2.6 Perencanaan Kinerja (Tahun Yang Dievaluasi) 21

 2.7 Indikator Kinerja Utama 34

 2.8 Perjanjian Kinerja 35

 2.9 Laporan Anggaran Per Sasaran 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 37

 3.2 Realisasi Anggaran 43

BAB IV

PENUTUP..... 75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sebagaimana terangkum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 menterjemahkan hasil evaluasi perencanaan program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, LKJIP pun menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi evaluasi pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur dalam pencapaian Rencana Strategis. Disamping itu, penyusunan LKJIP ini juga bertujuan menjadi tindak lanjut atas masalah pencapaian kinerja yang tengah dihadapi dalam upaya perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);



31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 84);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77)
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan uraian sebagai berikut :

1.3.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

1.3.2 Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas, membawahkan :
 - a) Sekretariat, membawahkan:
 - a.1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:
 - Fungsional Umum
 - b) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Koordinator Program Pengembangan Iklim, Promosi,



Pengendalian Dan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

- c) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Program Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian Dan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
- d) Penata Perizinan Ahli Madya Koordinator Program Pelayanan
- e) Penata Perizinan Ahli Muda Koordinator Program Pelayanan
- f) Perencana Ahli Muda
- g) Analis Kebijakan Ahli Muda

1.4 Potensi

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan organisasi, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 11 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:

Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 (Tiga) orang, golongan III sebanyak 7 (Tujuh) orang dan golongan II sebanyak 1 (Satu) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Sumber Daya Apartur (Orang)	%
1	Golongan IV	3	27,27%
2	Golongan III	7	63,64%
3	Golongan II	1	9,09%
	Jumlah	11	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

A. Berdasarkan Jabatan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 9 (Sembilan) orang, Fungsional Umum sebanyak 1 (Satu) orang, Honorer sebanyak 16 (enam belas) orang, Sukwan sebanyak 0 (nol) orang.



Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Sumber Daya Aparatur	%
1.	Pejabat Struktural	9	33,34%
	a Eselon II Kepala Dinas	1	3,7%
	b Eselon III Sekretaris dan Analis Kebijakan Ahli Madya	3	11,12%
	c Eselon IV Kepala Sub Bagian dan Analis Kebijakan Ahli Muda	5	18,52%
2.	Fungsional Umum	2	7,4%
3.	Honororer	16	59,26%
4.	Sukwan	0	0
	Jumlah	27	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

B. Berdasarkan Pendidikan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan pendidikan terdiri dari SLTA sebanyak 1 (satu) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, dan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Sumber Daya Aparatur	%
2	D3	1	9,09%
3	S1	8	63,64%
4	S2	2	18,18%
	Jumlah	11	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

1.5 Kinerja Pelayanan

Sejarah singkat DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, pada awal berdiri dikenal sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pangandaran



Peraturan Bupati Pangandaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2014.

Sementara itu seiring dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran dibentuklah DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 yang mana tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 yakni membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berpedoman pada penetapan pembentukan DPMPTSP sekaligus menyelaraskan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-4 (empat) Kabupaten Pangandaran yakni Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan persentase realisasi nilai investasi.

Tabel 1.4
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIK ATOR TUJUA N	INDIKA TOR SASARA N	SATU AN	TARGET RENSTRA 2021-2026 (Anggaran/Rp dan Kinerja/K)						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa																						
MISI 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal																						
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan // Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Realisasi nilai investasi	Persentase realisasi nilai investasi	%	Anggaran : Rp 438.263.250 Kinerja : 6,57%	Anggaran: Rp 131.063.000 Kinerja : 6,89%	Anggaran : Rp 354.011.200 Kinerja : 7,24%	Anggaran : Rp 284.221.500 Kinerja : 7,60%	Anggaran : Rp 394.984.500 Kinerja : 7,98%	Anggaran : Rp 402.984.500 Kinerja : 8,38%	Capaian Anggaran : Rp 403.771.800 Capaian Kinerja : 127% Capaian Nilai Investasi: 795.644.384.776	Capaian Anggaran : Rp 448.554.800 Capaian Kinerja : 124% Capaian Nilai Investasi: 1.781.364.863.491	Capaian Anggaran : Rp 382.813.750 Capaian Kinerja : -13.59% Capaian Nilai Investasi: 1.536.544.762.333	Capaian Anggaran : Rp 250 Capaian Kinerja : -0.17% Capaian Nilai Investasi: 4.762.333	*belum terealisasi	*belum terealisasi	Rasio thd Anggaran : 92,1 Rasio thd Kinerja: 1933	Rasio thd Anggaran: 342,2 Rasio thd Kinerja : 1800	Rasio thd Anggaran: 108,1 Rasio thd Kinerja : -187	Rasio thd Anggaran: 203.70 Rasio thd Kinerja: -2.23	*belum terealisasi	*belum terealisasi

**Data DPMPSTP s.d Tahun 2024



DPMPTSP pun ditunjuk untuk menyelenggarakan misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan nilai SAKIP. Sementara itu, untuk mencapai target indikator tujuan Nilai SAKIP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selalu berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk mencapai target indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP), DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Hal yang tak terpisahkan dari tingkat kepuasan masyarakat ialah kualitas pelayanan. Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, pariwisata, penataan ruang, bangunan, lingkungan hidup dan pertanahan. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pangandaran merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.5
Realisasi Jumlah Perizinan Tahun 2024

No	Nama Izin	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	30.561	8.143
2	NIB + SS (Risiko Menengah Rendah)	2.348	2.122
3	NIB + SS Risiko Menengah Tinggi	6	112
4	NIB + IZIN	12	81
5	PKKPR	54	30
6	Tanda Daftar Gudang	4	
7	SPPL	-	8.887
8	Sertifikat laik sehat di wilayah	3	
9	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	143	6
10	PBG	62	76



No	Nama Izin	Tahun 2023	Tahun 2024
11	IPR	27	15
12	Izin Operasional Satuan Pendidikan	89	3
13	SIK Perekam Medis	1	6
14	SIK Radiografer	3	2
15	SIK Refraksionis Optisien	5	-
16	SIK Sanitarian	-	1
17	SIP Ahli Teknologi Lab. Medik	10	22
18	SIP Apoteker	54	32
19	SIP Bidan	160	320
20	SIP Dokter	106	51
21	SIP Dokter Gigi	58	9
22	SIP Dokter Spesialis	12	9
23	SIP Dokter Hewan	18	-
24	SIP- Elektreo Medis	-	2
25	SIP Fisioterapis	9	5
26	SIP Penata Anestesi	2	-
27	SIP Perawat	178	142
28	SIP Tenaga Gizi	4	20
29	SIP Tenaga Teknis Kefarmasian	61	35
30	SIP Terafis Gigi dan Mulut	36	9
31	Izin Praktik Okupasi Terapis	3	-
32	Izin Praktik Perawat Gigi	32	-
34	Izin Tukang Gigi	9	-
35	Izin Operasional Labkesda	0	1
	Pencabutan Surat Izin	-	34
TOTAL		34.070	20.893

1.6 Sistematika Penulisan

LKJIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

1.4 Potensi

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.5 Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

➤ Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program organisasi.

➤ Rencana Kerja

Disajikan rencana tahun yang bersangkutan. Terutama menyangkut



kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut. Dan indikator keberhasilan pencapaian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan. Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

A. Visi

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 sebagai berikut :

***"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia
yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa"***

B. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Pernyataan misi membawa instansi kepada suatu fokus. Misi juga menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang akan dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Berikut ini merupakan Misi Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 yang mana Misi dengan cetak tebal merupakan Misi Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan



3. Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
4. **Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal**
5. **Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel**
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

2.2 Tujuan

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran turut serta membantu pencapaian tujuan dan sasaran daerah melalui misi Ke-4 (empat) yaitu **Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal**; dan misi yang Ke-5 (lima) yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel**.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka dalam hal ini DPMPTSP berupaya mewujudkan Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif.

2.3 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :



1. Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

2.4 Rencana Strategis

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja DPMPTSP yang dilaksanakan, memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Adapun strategi yang akan digunakan oleh DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penanaman modal
2. Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi penanaman modal daerah
3. Meningkatkan daya saing potensi investasi
4. Memberikan insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi
5. Meningkatkan promosi potensi investasi melalui even-even nasional
6. Pengawasan internal secara berkala
7. Evaluasi SAKIP
8. Memperkuat kewenangan dan koordinasi tim teknis perizinan
9. Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan secara online
10. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan
11. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
12. Mengembangkan layanan konsultasi dan/atau pengaduan

2.5 Arah Kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran diperlukan adanya kesatuan arah dan pola kerja. Untuk itu diperlukan kebijakan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Terkait hal tersebut sangat diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan dasar pijakan bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian perencanaan pembangunan daerah.



Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Pangandaran Tahunan 2021-2026. Adapun kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat di bidang penanaman modal
3. Penerapkan standar pelayanan dan SOP yang transparan serta optimalisasi layanan penanaman modal
4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan iklim investasi
6. Peningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan serta pengendalian investasi
7. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama investasi
8. Penyusunan dokumen potensi investasi unggulan daerah
9. Peningkatan kapasitas SDM
10. Pendampingan/asistensi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten
11. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan
12. Peningkatan kompetensi SDM
13. Penerapkan standar pelayanan konsultasi dan optimalisasi layanan pengaduan
14. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi
15. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan



Tabel 2.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada Urusan Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa			
Misi 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal			
Tujuan 1 : Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penanaman modal 2. Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi penanaman modal daerah 3. Meningkatkan daya saing potensi investasi 4. Memberikan insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi 5. Meningkatkan promosi potensi investasi melalui even-even nasional	1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat di bidang penanaman modal 3. Penerapkan standar pelayanan dan SOP yang transparan serta optimalisasi layanan penanaman modal 4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan iklim investasi 6. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan serta pengendalian investasi 7. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama investasi 8. Penyusunan dokumen potensi investasi unggulan daerah



Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	1. Pengawasan internal secara berkala 2. Evaluasi SAKIP	1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Pendampingan/asistensi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	1. Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan secara online 2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Mengembangkan layanan konsultasi dan/atau pengaduan	1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Penerapkan standar pelayanan konsultasi dan optimalisasi layanan pengaduan 4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Sumber : Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2021-2026



2.6 Perencanaan Kinerja (Tahun Yang Dievaluasi)

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, dengan mengacu pada tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dimaksudkan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut maka, ditetapkan beberapa kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Dalam hal ini kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Adapun rencana program prioritas dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja Prioritas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Penanaman Modal					
		Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah			
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Investor	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Investor
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas / Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Tingkat Efektifitas Kegiatan Promosi Penanaman Modal
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran			
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Tingkat Kualitas Pelayanan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah			
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Penanaman Modal	Tingkat Efektifitas Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
				Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Tingkat Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang Dikelola
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan



Selain program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana telah di jelaskan di atas, dalam rangka menggerakkan perangkat daerah DPMPTSP secara optimal juga dibutuhkan program dan kegiatan operasional yang bersifat rutin. Program dan kegiatan yang bersifat rutin ini menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas dalam rangka memberikan dukungan terhadap operasional kantor DPMPTSP Kabupaten Pangandaran supaya dapat berjalan secara maksimal. Adapun program dan kegiatan pendukung yang bersifat rutin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja Penunjang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Penanaman Modal					
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik good (governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Tingkat Kualitas dan Kapasitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Pemerintahan Daerah yang Terpelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2.7 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 2.5 (T-C.25)
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

N O	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa											
MISI 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal											
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan // Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	$\frac{((Jumlah\ Investasi\ Tahun\ n) - (Jumlah\ Investasi\ Tahun\ n-1)) \times 100\%}{Jumlah\ Investasi\ Tahun\ n-1}$	DPMPTSP	DPMPTSP	6,57	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38
VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa											
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel											
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) // Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran	(Nilai hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten terhadap akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan di DPMPTSP)	DPMPTSP	DPMPTSP	65,25 – 67,00	67,25 – 69,00	69,25 – 72,00	72,25 – 81,00	76,25 – 81,00	81,25 – 85,00
VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa											
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel											
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive // Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	(Nilai interval yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan)	DPMPTSP	DPMPTSP	2,55- 2,60	2,61- 2,65	2,66- 2,75	2,86- 2,95	2,96- 3,05	3,06- 3,15



2.8 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	7,60	430.565.300
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran	Nilai (72,25–81,00)	3.867.613.883
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	Nilai Interval (2,86-2,95)	644.963.851

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.867.613.883	
Program Promosi Penanaman Modal	24.280.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	644.963.851	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	77.990.382	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK)	602.840.000	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	41.552.000	
Total anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis	Rp 5.259.240.116	



2.9 Laporan Anggaran Per Sasaran

Pada pembahasan ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga disajikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian target pada awal periode perencanaan yang kemudian juga dialokasikan pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara rinci kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program tersebut beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif, yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selama periode perubahan renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Laporan Realisasi Per Sasaran Tahun 2024
DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI	
		K	Rp
(1)	(2)		
1	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah (APBD Kab.Pangandaran)	-0.17	72.866.900
	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah (DAK NON FISIK)		542.808.750
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran (APBD Kab.Pangandaran)	69,90	2.947.602.911
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran (APBD Kab.Pangandaran)	3,41	147.834.094
TOTAL REALISASI ANGGARAN			3.711.112.655



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu-rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja tahunan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan evaluasi kinerja tahun 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pembangian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal. Sejalan dengan peraturan tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yakni membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus mengembangkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran disusun sebagai mana penjelasan berikut :

Tabel 3.1
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (n-1)	REALISASI (n-1)	TARGET 2024	REALISASI 2024	KEBERHASILAN	HAMABATAN	UPAYA PERBAIKAN	KET.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	69,25	69,55	72,25 - 81,00	69,90	-	-	Pelajari hasil LHE, lanjutkan dengan upaya perbaikan agar akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran (Nilai AKIP diberikan setelah dievaluasi oleh Inspektorat Kab. Pangandaran)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	2,86 - 2,95	3,48	2,66-2,75	3,41	Berikan kualitas pelayanan publik yang prima	-	-	Nilai interval pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2024
Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	7,24	1.539.208.559.642 atau -13.59%	7,60	1.536.544.762.333 atau -0.17%	Lakukan analisis data LKPM secara cermat dan berkala	-	-	Nilai Investasi pada Tw IV Tahun 2024



Penjelasan :

Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa secara umum terdapat kemajuan dalam realisasi sistem akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dibandingkan dengan tahun lalu.

1. **Persentase realisasi nilai investasi**, Target capaian persentase pertumbuhan realisasi nilai investasi tahun 2024 adalah 7,60% dan memperoleh capaian nilai investasi Rp 1.536.544.762.333 dengan persentase pertumbuhan realisasi nilai investasi (-0.17%). Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, terjadi peningkatan capaian persentase realisasi nilai investasi di DPMPTSP dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 7,24% dengan perolehan capaian nilai investasi sebesar Rp 1.536.544.762.333.

Persentase Peningkatan Investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi investasi tahun } n-1$$

$$\frac{((1.536.544.762.333 - (1.539.208.559.642))}{1.539.208.559.642} \times 100\% = -0.17$$

2. **Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**, pada tahun 2024 ditargetkan 72,25- 81,00 dengan capaian 69,90 atau memperoleh nilai A. Nilai ini merupakan nilai hasil evaluasi LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2024 bersumber dari data-data dan dokumen yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selama penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintahan tahun 2024.
3. **Nilai interval pelayanan publik**, Target capaian nilai interval pelayanan publik tahun 2024 adalah 2,86-2,95 dan memperoleh nilai capaian 3,41 setelah dilakukan proses pengukuran penyelenggaraan pelayanan publik selama tahun 2024. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, terjadi penurunan kualitas nilai interval terhadap pelayanan publik di DPMPTSP dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 2,66-2,75 dengan perolehan nilai capaian 3,48.



Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah dapat direalisasikan dengan baik.

Sistem pengumpulan data kinerja tahun 2024 telah terbangun dengan baik. Oleh karena itu di masa yang akan datang pengembangan sistem pengukuran kinerja mutlak dilakukan oleh seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan/ Indikator SPM	Target
1.	Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha
2.	Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).	1 Kali
3.	Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	100%
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali
5.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE).	10%

Adapun perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan SPM Nasional dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :



Table 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan/ Indikator SPM	Target Nasional	Realisasi (Tahun Yang Dievaluasi)	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha	N/A	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi investasi nilai
2.	Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).	1 Kali	1 Kali	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi investasi nilai
3.	Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.	1 Kali	-	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi investasi nilai
4.	Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	672 Kali	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi investasi nilai
6.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE).	100%	10%	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi investasi nilai

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2024

Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dengan standar Nasional, sebagian besar menunjukkan hasil positif bagi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran hal tersebut didukung oleh faktor :

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Pangandaran
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran
4. Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
5. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media
6. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan



7. Bantuan dana (DAK Non Fisik) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Namun terdapat pula target capaian yang belum terealisasi oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Permasalahan dalam mencapai kinerja Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian program kegiatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar koordinator bidang, bagian, sub bagian di jajaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun alternatif solusi untuk kemajuan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dimasa mendatang adalah :

1. Perlu disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah/Kabupaten/Kota
2. Perlu adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota
3. Perlu adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
4. Perlu diadakan Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
5. Perlunya eksistensi dalam Kegiatan pameran penanaman modal
6. Perlu adanya Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
7. Perlu adanya Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota
8. Perlu adanya Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN yang rutin dan berkelanjutan
9. Perlu adanya peningkatan sistem/ teknologi untuk menjamin ketersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
10. Perlu adanya peningkatan kualitas layanan konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal



3.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bertujuan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat dan kemudahan pencapaian. Dari hasil evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi.

Pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2024 secara finansial didukung oleh APBD Kabupaten Pangandaran dan tertuang sebagaimana data pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.4
Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
									I		II		III		IV					
					Indikator Kinerja	Satuan			Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.259.240 .116		897.465.2 99		844.299.4 51		1.217. 911.32 9		1.712. 853.57 1		3.711.112. 655		70,56
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persent ase (%)	81,0 0	3.867.613 .883	20,25	880.565.2 99	20,2 5	668.338.4 51	20,2 5	1.003. 395.93 5	18,3 0	395.30 3.226	79,05	2.947.602. 911	97,59	76,21
					2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persent ase (%)	81,0 0		20,25		20,2 5		20,2 5		18,3 0		79,05			
					3. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persent ase (%)	81,0 0		20,25		20,2 5		20,2 5		18,3 0		79,05			
					4. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persent ase (%)	81,0 0		20,25		20,2 5		20,2 5		20,2 5		81,00			



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
											Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp				
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persent ase (%)	81,0 0	27.800.00 0	20,25	1,700,000	20,2 5	5,100,000	20,2 5	1,700, 000	20,2 5	3,400, 000	81,00	11.900.00 0	100,00	42,80
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	27.800.000	1,00	1.700.000	1,00	5.100.000	1,00	1.700.0 00	1,00	3.400.0 00	3,00	11.900.000	100	42,80
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	
						Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persent ase (%)	81,0 0	1.645.342 .947	20,25	321,676,5 57	20,2 5	409,706,4 93	20,2 5	369,06 3,131	20,2 5	222,10 2,919	20,25	1,322,549, 100	100,00	80,38



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp
						Perangkat Daerah																
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	16,00	1.614.402. 959	11,00	319,976,55 7	11,00	404,606,49 3	9,00	367,36 3,131	9,00	218,70 2,919	11,00	1,310,649,1 00	68,75	81,18
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	2,00	1.569.994	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1.569.994	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan			Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	27.800.000	1	1.700.000	1	5.100.000	1	1.700.000	-	3.400.000	1	11.900.000	100,00	42,80
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase (%)	81,00	27.800.000	20,25	1.700.000	20,25	5.100.000	20,25	1.700.000	20,25	3.400.000	81,00	11.900.000	100,00	42,80
						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	27.800.000	1	1.700.000	1	5.100.000	1	3.400.000	-	1.700.000	1	11.900.000	100,00	42,80
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase (%)	81,00	27.800.000	20,25	1.700.000	20,25	5.100.000	20,25	3.400.000	20,25	1.700.000	81,00	11.900.000	100,00	42,80



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)							Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
												I		II		III		IV					
								Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerja	%
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	27.800.000	1	1.700.000	1	5.100.000	1	3.400.000	-	1.700.000	1	11.900.000	100,00	42,80	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persentase (%)	81,00	23.000.000	20,25	1.400.000	20,25	4.200.000	20,25	1.400.000	20,25	2.800.000	81,00	9.800.000	100,00	42,60
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	23.000.000	1	1.400.000	1	4.200.000	1	1.400.000	1,00	2.800.000	1	9.800.000	100,00	42,60	
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
							Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)							Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
												I		II		III		IV					
								Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerj a	Rp
							Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
							Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
							Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persent ase (%)	81,0 0	446.416.3 17	19,00	45.840.80 0	19,0 0	20.795.60 0	19,0 0	66.448 .730	19,0 0	53.902 .716	76,00	186.987.8 46	100,00	41,89
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		
											I		II		III		IV						
											Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp					Kinerj a
							Elektronik pada SKPD																
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	24.993.560	1,00	2,000,000	0	0	3	5,185,500.00	1,00	3,500,000	5,00	10,685,500	83,33	42,75
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	2.974.631	0,00	0	0	0	0	1	1,180,000	1,00	1,180,000	20,00	39,66	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	110.565.499	1,00	600,000	0	0	3	86,503,300.00	1,00	670.000	5,00	87,773,300	83,33	79,38
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15,00	6.516.184	3,00	160,000	3	260,000	3	290,000	3,00	970,000	4,00	1,680,000	80,00	25,78
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30,00	69.427.200	5,00	11,655,009	8	21,873,040	8	14,935,600	7	11,885,330	28,00	60,348,979	93,33	86,92



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerja	%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	70,00	119.964.37 5	0,00	0	67	111,858,48 6	0	0	0	0	67,00	111,858,486	95,71	93,24
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persent ase (%)	81,0 0	883.344.1 10	20,25	190,473,7 33	20,2 5	93,940,43 2	20,2 5	102,15 3,050	20,2 5	102,84 8,577	81,00	489,415,7 92	100,00	63,34
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	38,00	2.985.000	1,00	1.000,000	0	0	1	700,00 0	1,00	700,00 0	3,00	2,200,000	7,89	73,70
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	655.570.26 0	1	153,473,73 3	1	79,140,432	1	71,043, 050	1	69,588, 577	2,00	373,245,792	100,00	56,93
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	224.788.85 0	1	36,000,000	1	14,800,000	2	30,410, 000.00	1	32,760, 000.00	5,00	113,970,000	93,33	50,70



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
											Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp				
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persent ase (%)	81,0 0	719,308,7 04	20,25	554,086,9 91	20,2 5	0	20,2 5	539,91 5,000	20,2 5	1,010, 140,00 0	81,00	715,668,7 04	100,00	99,49
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11,00	108.386.70 4	275,00	554,086,99 1	0	0	11	104,74 6,704.0 0	0	0	11,00	104,746,704	91,38	88,11
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29,00	610.922.00 0	15,00	338,500,00 0	0	0	14	272,42 2,000.0 0	0	0	29,00	610,922,000	0,00	0,00
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
						Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Unit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)							Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
												I		II		III		IV					
												Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp				
						Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persent ase (%)	81,0 0	176,299,8 38	20,25	9,000,000	20,2 5	11,200,00 0	20,2 5	41,596 ,650	20,2 5	39,146 ,400	81,00	100,943,0 50	100,00	57,25	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3,00	29.952.000	0,00	0	0	0	1	15,000, 000	0	0	1,00	15,000,000	33,33	50,08	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	52.985.450	1,00	4,000,000	1	11,200,000	1	12,089, 900	1,00	7,110,0 00	1	34,399,900	100,00	64,92	



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerja	%
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00	70.367.388	2	4,000,000	0	0	1	13,426, 750	2,00	12,660, 000	5,00	30,086,750	100,00	42,75
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	22.995.000	1	1,000,000	0	0	1	1,080,0 00	3,00	19,376, 400	5,00	21,456,400	100,00	93,30
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	Jumlah Investor	0,00	0	0,00	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian	Jenis Dokume	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp
						Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	n/ Laporan														
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
						Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah dan Jenis Dokumen Peta	Jenis Dokume	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
											Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp				
						Kabupaten/Kot a	Potensi Investasi Kabupaten/Kota	n/ Laporan														
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	%	10,0 0	-	0,00	-	0	-	0	-	1	23,270 ,000	1,00	23,270,00 0	0,00	0,00
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiata n/Doku me n/ Laporan	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	1	23,270 ,000	1,00	23,270,00 0	0,00	0,00
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerj a	Rp
						Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab/Kota															
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	8,00	24.280.000	0,00	0	0	0	0	0	1	23,270, 000	1,00	23,270,000	12,50	95,84
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persent ase (%)	100, 00	644.963.8 51	25,00	14,100,00 0	25,0 0	18,750,00 0	25,0 0	64,712 ,994	25,0 0	50,271 ,100	100,0 0	147,834,0 94	100,00	22,92
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1,00	644.963.8 51	25,00	14,100,00 0	25,0 0	18,750,00 0	25,0 0	64,712 ,994	25,0 0	50,271 ,100	100,0 0	147,834,0 94	100,00	22,92



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerj a	Rp
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	368,0 0	478.516.90 0	7.948	7,000,000	5.500	0	4.145	56,362, 994.00	1.788	34,471, 100.00	19.381	97,834,094	9404,48	20,44
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	368,0 0	75.565.849	20	4,200,000	20	11,250,000	20	3,750,0 00	20	10,000, 000.00	80	29,200,000	21,73	38,64
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	Orang	100,0 0	42.095.914	9,00	1,400,000	2	7,500,000	36	2,500,0 00	21	2,800,0 00.00	68,00	14,200,000	68,00	33,73



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
							Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kinerja	%
						perizinan berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha	368,0 0	48.785.188	20	1,500,000	0	-	20	2,100,0 00.00	20	3,000,0 00.00	60,00	6,600,000	16,30	13,52
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	428, 71	680.830.3 82	649,87	2,800,000	425, 53	157,211,0 00	292, 44	137,37 7,000. 00	168, 68	281,59 2,250. 00	1536, 54	578,980,2 50	-0,17	85,04



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Renja PD 2024)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
											Indikator Kinerja	Satuan	Kiner ja	Rp	Kinerj a	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	10,00	41.552.000	0,00	0	0	0	1	12,425,400	1	1,000,000	2,00	13.425.400	2,00	32,30
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1,00	41.552.000	0,00	0	0	0	1	12,425,400	1	1,000,000	1,00	13.425.400	2,00	32,30



3.2.1 Evaluasi Target Kinerja dan Anggaran Terhadap RKPD Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

URUSAN PENANAMAN MODAL

A. Pelaksanaan Program Kegiatan

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja (1) Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, dengan target kinerja 81%; (2) Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, dengan target kinerja 81%; (3) Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, dengan target kinerja 81%; dan (4) Persentase peningkatan kompetensi aparatur, dengan target kinerja 81%. Pagu anggaran untuk program ini adalah Rp 3.867.613.883 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 2.947.602.911 dan indikator kinerja (1) Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas tercapai 81,00%; (2) Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik tercapai 81,00%; (3) Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi tercapai 81,00%; dan (4) Persentase peningkatan kompetensi aparatur tercapaian 81,00% .
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja; (1) Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target kinerja 81%; (2) Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target kinerja 81%; (3) Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target kinerja 81%. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp 30,276,835 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja (1) Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu tercapai 81%; (2) Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu tercapai 81%; (3) Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu tercapai 81%.
- 1.1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 6 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV



teralisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 6 dokumen.

- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, memiliki indikator kinerja jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 3 laporan. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp 2.476.835 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 0 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 3 laporan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik dengan target kinerja 81%. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.645.342.947 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.322.549.100 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 81%.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, memiliki indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja 16 orang. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 1.614.402.959 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.310.649.100 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 11 orang.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 2 laporan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 1.569.994 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 2 laporan.
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 1.569.994 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 laporan.
 - 2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, memiliki indikator kinerja jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan



target kinerja 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 Dokumen. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 1 Dokumen.

3.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, memiliki indikator kinerja jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target kinerja 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 dokumen.

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik dengan target kinerja 1 laporan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11,900,000 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 1 laporan.

4.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja 1 laporan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 27,800,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11.900.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 laporan.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik dengan target kinerja 1 Dokumen. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 23,000,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 9,800,000 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 1 Dokumen.

5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini



sebesar Rp 23,000,000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 9,800,000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 dokumen.

- 5.2 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, memiliki indikator kinerja Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, memiliki indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target kinerja 0 paket. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 0 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 0 paket.
- 5.4 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, memiliki indikator kinerja jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.5 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.6 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memiliki indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.7 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik dengan target kinerja 3 Laporan. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 334.441.449 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 273.526.265 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 3 Laporan.
 - 6.1 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, memiliki indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan



Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja 6 paket. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 24.993.560 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 10.685.500, dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 5 paket.

6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 5 paket. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 2.974.631 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.180.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 paket.

6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, memiliki indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan target kinerja 6 paket. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 110.565.499 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 87.773.300 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 5 paket.

6.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target kinerja 15 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 6.516.184 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.680.000, dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 12 dokumen.

6.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 30 laporan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 69.427.200 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 60.348.979 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 28 laporan.

6.7 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 70 paket. Pagu anggaran sebesar Rp 119.964.375 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 111.858.486, dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 67 paket.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,



memiliki indikator kinerja Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan dengan target 3 Laporan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 883.344.110 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 489.415.792 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 3 Laporan.

7.1Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 38 laporan. Pagu anggaran sebesar Rp 2.985.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 2.200.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 12 laporan.

7.2Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja 3 laporan. Pagu anggaran sebesar Rp 655.570.260 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 373.245.792 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 2 laporan.

7.3Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 6 laporan. Pagu anggaran sebesar Rp 224.788.850 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 113.970.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 5 laporan.

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi dengan target kinerja 1 Laporan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 719.308.704 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 715.668.704 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 1 Laporan.

8.1Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target kinerja 29 unit. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 610.922.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 610.922.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 29 unit.

8.2Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang



Disediakan dengan target kinerja 11 unit. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 108.386.704 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 104.746.704 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 11 unit.

8.3Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, memiliki indikator kinerja Jumlah paket mebel yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

8.4Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, memiliki indikator kinerja Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

8.5Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, memiliki indikator kinerja Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

8.6Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja prasarana yang baik dan layak fungsi dengan target kinerja 4 Laporan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 176.299.838 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 100.943.050 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 4 Laporan.

9.1Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target kinerja 2 unit. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 29.952.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 15,000,000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 unit.

9.2Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, memiliki indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja 1 unit. Pagu anggaran



sub kegiatan ini sebesar Rp 52.985.450 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 34.399.900 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 1 unit.

9.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kinerja 5 unit. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 70.367.388 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 30.086.750 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 5 unit.

9.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target kinerja 3 unit. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 22.995.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 21.456.400 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 3 unit.

(2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor dengan target kinerja 0 jumlah investor. Pagu anggaran program ini sebesar Rp 0 dan indikator kinerja program ini tercapai 0 jumlah investor.

10. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.

10.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

10.2 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.

11. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan target kinerja 0 jumlah investor. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 0 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 1 jenis dokumen.
- 11.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 0 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 0 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 0 dokumen.
- 11.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- (3) Program Promosi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.280.000,00.
12. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.280.000,00.
- 12.1 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp0.
- 12.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja 1 Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.280.000.
- (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja 100 persen. Pagu anggaran program ini sebesar Rp 644.963.851 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 147.834.094 dan indikator kinerja program ini tercapai 100 persen.
13. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu

Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan target kinerja 100 persen. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 644.963.851 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 147.834.094 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 100 persen.

13.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target kinerja 368 pelaku usaha. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 478.516.900 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 97.834.094 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 19.381 pelaku usaha.

13.2 Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan target kinerja 368 kegiatan usaha. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 75.565.849 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 29.200.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 80 kegiatan usaha.

13.3 Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, memiliki indikator kinerja Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target kinerja 100 orang. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 42.095.914 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 14.200.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 68 orang.

13.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, memiliki indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan target kinerja 60 kegiatan usaha. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 48.785.188 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 6.600.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 60 kegiatan usaha.

(5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, memiliki

indikator kinerja Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dengan target kinerja 428,71 milyar rupiah. Sumber pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 680.830.382 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 578.980.250 dan indikator kinerja program ini tercapai 1,536 milyar rupiah.

14. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja umlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 3 Laporan. Sumber pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 680.830.382 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 578.980.250 dan indikator kinerja kegiatan ini tercapai 3 Laporan.

14.1 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, memiliki indikator kinerja Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan target kinerja 11 kegiatan usaha. Sumber pagu sub kegiatan ini merupakan DAK Non Fisik sebesar Rp 90.425.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 42.468.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 11 kegiatan usaha.

14.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, memiliki indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan target kinerja 323 pelaku usaha. Sumber pagu sub kegiatan ini merupakan DAK Non Fisik sebesar Rp 331.563.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 324.143.000 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 370 pelaku usaha.

14.3 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan target kinerja 20 kegiatan usaha. Sumber pagu sub kegiatan ini dari APBD dan DAK Non Fisik sebesar Rp 258.842.382



yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 212.369.250 dan indikator kinerja sub kegiatan ini tercapai 286 pelaku usaha

(6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 41.552.000.

15. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 41.552.000.

15.1 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, memiliki indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 41.552.000.



BAB IV

PENUTUP

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Banyuasin. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Pencapaian Misi Ke-4 (empat) Kabupaten Pangandaran yakni Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan persentase realisasi nilai investasi.
2. a. Pencapaian Misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan sasaran pertama pada Misi Ke-5 (Lima) yakni meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), DPMPTSP Kabupaten Pangandaran memenuhi ketercapaian indikator tujuan Indeks nilai LHE SAKIP.



b. Pencapaian Misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan sasaran kedua pada Misi Ke-5 (Lima) yakni meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan responsif, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran memenuhi ketercapaian indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama untuk meningkatkan indikator persentase realisasi nilai investasi.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2024 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (n-1)	REALISASI (n-1)	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET.
Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	7,24	13.59 Dengan capaian nilai investasi : Rp 1.539.208.559.642	7,60	-0.17 Dengan capaian nilai investasi : Rp 1.536.544.762.333	Persentase Realisasi Nilai Investasi pada T.A 2024
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	69,25-69,00	69,55	72,25-81,00	69,90	**Nilai LHE AKIP diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	2,66-2,75	3,48	2,86-2,95	3,41	Mutu pelayanan A (pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2024)



Tabel Efisiensi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024 (K)	% (K)	REALISASI 2024 (Rp)	% (Rp)	EFISIENSI [K (%) – Rp (%)]
Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	-0.17	-2	Rp 578.980.250	85,04	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	69,90	96	Rp 2.947.602.911	76,21	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	3,41	119	Rp 147.834.094	22,92	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut :

1. **Persentase realisasi nilai investasi**, Target capaian persentase realisasi nilai investasi tahun 2024 adalah 7,60% dan memperoleh nilai investasi Rp 1.536.544.762.333 dengan capaian persentase realisasi nilai investasi -0.17%. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, terjadi penurunan capaian persentase realisasi nilai investasi di DPMPTSP dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 7,24% memperoleh nilai investasi sebesar Rp 1.539.208.559.642 dengan capaian persentase realisasi nilai investasi -13.59%.

Persentase Peningkatan Investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{((1.536.544.762.333 - (1.539.208.559.642)))}{1.539.208.559.642} \times 100\% = -0,17$$



2. **Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**, pada tahun 2024 ditargetkan 72,25-81,00 diperkirakan memperoleh capaian nilai LHE AKIP 69,90 atau nilai A. Nilai ini merupakan nilai perkiraan hasil evaluasi LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2024 yang bersumber dari data-data dan dokumen yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selama penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintahan tahun 2024.
3. **Nilai interval pelayanan publik**, Target capaian nilai interval pelayanan publik tahun 2024 adalah 2,86-2,95 dan memperoleh nilai capaian 3,41 setelah dilakukan proses pengukuran penyelenggaraan pelayanan publik selama tahun 2024. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, terjadi penurunan kualitas nilai interval terhadap pelayanan publik di DPMPTSP dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 2,66-2,75 dengan perolehan nilai capaian 3,48.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah dapat direalisasikan dengan baik.

Sistem pengumpulan data kinerja tahun 2024 telah terbangun dengan baik. Oleh karena itu di masa yang akan datang pengembangan sistem pengukuran kinerja mutlak dilakukan oleh seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Permasalahan dalam mencapai kinerja Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian program kegiatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar koordinator bidang, bagian, sub bagian di jajaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran di DPMPTSP Kabupaten

Pangandaran untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2024, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :

1. Sasaran ke-1 : Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah

Keberhasilan :

- a) Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
- b) Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Pangandaran
- c) Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran
- d) Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
- e) Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
- f) Bantuan dana (DAK Non Fisik) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Upaya Perbaikan :

- a) Perlu disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah/Kabupaten/Kota
- b) Perlu adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota
- c) Perlu adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
- d) Perlu diadakan Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
- e) Perlunya eksistensi dalam Kegiatan pameran penanaman modal
- f) Perlu adanya Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
- g) Perlu adanya Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota
- h) Perlu adanya Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN yang rutin dan berkelanjutan

2. Sasaran ke-2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Keberhasilan :

- a) Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai



target kinerja peningkatan investasi

Upaya Perbaikan :

- a) Perlu adanya peningkatan sistem/ teknologi untuk menjamin ketersedianya data dan informasi kinerja
- b) Mempelajari hasil LHE, lanjutkan dengan upaya perbaikan agar akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

3. Sasaran ke-3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Keberhasilan :

- a) Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
- b) Terus berupaya memberikan pelayanan yang prima

Upaya Perbaikan :

- a) Perlu adanya peningkatan sistem/ teknologi untuk menjamin ketersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

Pada dasarnya masih target capaian yang belum terealisasi sempurna pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Permasalahan dalam mencapai kinerja Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian program kegiatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar koordinator bidang, bagian, sub bagian di jajaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada setiap Tahun Anggaran.



Demikian laporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Parigi, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



JAJA NURULHUDA, ST. M.Dev.Plq

NIP 19720106 199803 1 002